



JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 11, No. 1, Januari 2025

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAD PROVINSI JAWA BARAT DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KAWALUYAAN TAHUN 2023

Yati Nurhajati ¹, Rizky Nurmulyani ²

Politeknik LP3I Bandung

Email: nurhajatiyati@yahoo.co.id¹, dan rizkynurmulyani.r.21.ak@plb.ac.id²

ABSTRACT

One of the ways regional governments can increase local revenue (PAD) is by increasing the target for revenue collection from Motor Vehicle Tax (PKB). This research aims to find out how big the contribution of the motor vehicle tax reduction program is in increasing the local revenue (PAD) of West Java Province at the Kawalayaan Samsat Joint Office. The research method used is a quantitative descriptive method, which explains or describes the state of West Java Province PAD in relation to income from motor vehicle tax at the time the whitening program was held, as well as identifying the obstacles faced in implementing the motor vehicle tax Bleaching program and the solutions offered by Samsat. The data used in this research was obtained from the results of evaluations, interviews and data collected at the Kawalayaan Samsat Office for the period July - December 2023. The results of the analysis and discussion show that during the Bleaching program, and based on the Regional Tax Contribution Level Indicator of the Minister of Home Affairs Decree No. 690,900,327, motor vehicle tax revenue in the Kawalayaan Samsat made a significant contribution to West Java's PAD. Because its contribution is in the very good category because it is in the 60% range.

Keywords: *bleaching program; motor vehicle tax; PKB; local original revenue; PAD.*

Pendahuluan

Pemungutan Pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintahan. Pemerintahan daerah di Indonesia yang melakukan otonomi daerah berusaha mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan

pembangunan daerah dan pelayanan publik. Salah satu cara meningkatkan penerimaan pemerintah daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah dengan melakukan peningkatan target penerimaan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat Di Kantor Bersama Samsat Kawaluyaan Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari (1) pajak kendaraan bermotor (PKB), (2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), (4) pajak air permukaan, dan (5) pajak rokok. (djpk.kemenkeu.go.id). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136.316.726 unit (bps.go.id,2020). Sementara itu menurut data dari Korlantas Polri, tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang aktif sampai periode 9 Februari 2023 tercatat mencapai 153.400.392 unit. (korlantas.polri.go.id,2022). Pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat ini, seharusnya diikuti pula dengan besarnya potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Penggunaan penerimaan dari pajak kendaraan sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan, dan akan memberikan manfaat langsung bagi para pengguna kendaraan itu sendiri. Sementara itu menurut Kompas.com (2023), Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah provinsi dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terbanyak keempat di Indonesia dengan jumlah total kepemilikan kendaraan bermotor ditaksir berjumlah 17.157.839 unit. Namun faktanya pembayaran pajak tidak mencapai 50% dari total kepemilikan kendaraan bermotor

tersebut berarti kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah.

Menurut BPK Perwakilan Provinsi Jawa barat (2022) Pemerintah Jawa Barat dalam memaksimalkan pendapatan Pajak Kendaraan, menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditujukan untuk meringankan Wajib Pajak dengan bebas biaya dan diskon, mulai dari pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), ini diberikan kepada seluruh Masyarakat Jawa Barat yang terlambat melakukan proses pembayaran. Lalu ada pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKM II), selanjutnya ada pembebasan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun ke-5 yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 4 tahun. Sementara untuk diskon yang diberikan, ada pengurangan Sebagian pokok pajak kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari sebesar 2 %, jatuh tempo lebih dari 30-60 sebesar 4%, jatuh tempo lebih dari 60-90 hari sebesar 6%, jatuh tempo lebih dari 90-120 hari, dan sebesar 8% atau jatuh tempo lebih dari 120-180 hari sebesar 10%. Ada juga diskon pengurangan Sebagian pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-1 (BBNKB I) sebesar 2.5%.

Proses penyebaran informasi Program Pemutihan PKB kepada masyarakat sudah dilakukan melalui media massa dan media sosial. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Menurut Nurhalimah dan Muthmainnah. (2023) Tidak sedikit masyarakat masih salah paham yang mengira bahwa wajib pajak tidak perlu membayar pajak. Padahal pemutihan PKB hanya menghilangkan denda pajak yang telah disebabkan saja dan tetap harus membayar pajaknya dalam jumlah yang sudah ditentukan sesuai aturan pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pad provinsi jawa barat di kantor bersama samsat kawalayaan tahun 2023”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambar, menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi fenomena. Selain itu metode penelitian deskriptif kualitatif menurut pendapat Sugiyono (2016;13) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Dilakukan di Kantor Samsat II Kawalayaan Bandung yang

bertempatkan di Jl. Kawalayaan Raya, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode ini diterapkan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan alat analisis kontribusi.

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor Bersama Samsat Kawalayaan dilakukan pada periode bulan Oktober sd Desember 2023, Namun untuk melihat peningkatan dalam pendapatan maka data yang diambil adalah data dari bulan Juli 2023 yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan dan data hasil pendapatan yang diperoleh di bulan program pemutihan yaitu bulan Oktober sd Desember 2023.

Data Realisasi PAD /Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulan Juli-Desember 2023 disajikan pada Tabel 1.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat Di Kantor Bersama Samsat Kawalayaan Tahun 2023

Tabel 1. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bulan	Total PAD
Juli	424.162.520.114
Agustus	495.431.430.414
September	554.757.978.755
Oktober	615.093.816.665
Nopember	675.917.344.965
Desember	745.920.690.464

Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, 2023

Tabel 1 menunjukkan, pada bulan Oktober mulai adanya program pemutihan PKB yang berdampak pada penerimaan pendapatan daerah. pada bulan Oktober mengalami kenaikan sebesar Rp. 60.335.837.910 dari bulan September.

Pada bulan November mengalami peningkatan penerimaan PAD sebesar Rp. 60.823.528.300. PAD yang diterima sebesar Rp. 675.917.344.965

Pada bulan Desember atau bulan terakhir diadakan program pemutihan, terjadi peningkatan yang lebih besar yaitu PAD yang diterima sebesar Rp. 745.920.690.464 meningkat sebesar Rp. 70.003.345.499 dari bulan November.

Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor)

Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bulan Juli-Desember seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bulan Juli-Desember 2023

Bulan	Target	Realisasi	%
Juli	462.909.667.400	258.893.252.200	55,94 %
Agustus	462.809.667.400	304.604.798.200	65,82 %
September	462.809.667.400	341.141.246.100	73,71 %
Oktober	462.809.667.400	379.796.748.100	82,06 %
Nopember	463.539.641.509	421.205.675.300	90,87 %
Desember	458.773.098.539	468.148.468.600	102,04 %

Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, 2023

Tabel 2 menunjukkan, Dengan berjalannya waktu dan implementasi

program pemutihan, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Desember berhasil melebihi target dan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Penerimaan mencapai Rp. 468.148.468.600, atau mencapai 102,04% dari target sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp. 458.773.098.539. Berikut adalah grafik yang menggambarkan perkembangan antara Target dan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bulan Juli-Desember 2023, seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bulan Juli-Desember 2023

Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, 2023

Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan menggunakan analisis ini, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor di Samsat Kawalayaan terhadap PAD Provinsi Jawa Barat. Melalui perbandingan hasil analisis dari bulan ke bulan selama sebelum dan selama diadakan program (Juli-Desember), akan diperoleh informasi mengenai fluktuasi kontribusi tersebut, serta dapat mengidentifikasi kontribusi terbesar dan terkecil dari dari bulan ke bulan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam enam bulan sebelum dan selama diadakan program

(Juli-Desember) seperti yang disajikan pada persamaan 1.

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah (Pajak Kendaraan bermotor)}}{\text{Realisasi PAD (Penerimaan PAD Total)}} \times 100\% \quad (1)$$

Analisis ini akan memungkinkan untuk memahami sejauh mana peran pajak kendaraan bermotor, terutama selama program pemutihan di Samsat Kawalayaan, dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini akan memberikan wawasan yang berharga mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor dalam mendukung keuangan daerah dan dapat menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan yang lebih efektif di masa yang akan datang.

Berikut adalah kriteria kontribusi yang digunakan dalam analisis yaitu berdasar Indikator Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Sepdagri Kepmendagri No. 690.9000.327, seperti yang disajikan pada Gambar 2.

Pendapatan Asli Daerah	
Persentase	Tingkat Kontribusi
<10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sepdagri Kepmendagri
No. 690.9000.327

Gambar 2

Indikator Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Sumber: Depdagri, Kepmendagri
No.690.900.327 tahun 2022

Dalam analisis ini, berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak kendaraan bermotor dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Samsat PPPD Wilayah Kota Bandung II

Kawalayaan, diperoleh hasil kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan terhadap pendapatan asli (PAD)

Bulan	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	PAD (Realisasi)	%
Juli	258.893.252.200	424.162.520.114	61,04 %
Agustus	304.604.798.200	495.431.430.414	61,48 %
September	341.141.246.100	554.757.978.755	61,49 %
Oktober	379.796.748.100	615.093.816.665	61,75 %
Nopember	421.205.675.300	675.917.344.965	62,32 %
Desember	468.148.468.600	745.920.690.464	62,76 %

Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, 2023

Berdasarkan Tabel 3, menurut Kemendagri Nomor 690.900.327 bulan Juli s d Desember tersebut masuk dalam kategori sangat baik karena berada di rentang 60%. Tampaknya Samsat Kota Bandung II Kawalayaan telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu selama diadakan program pemutihan. Hal ini dapat disimpulkan dari kontribusi yang signifikan yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor dari Samsat tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kontribusi yang stabil dan meningkat selama diadakan program menunjukkan bahwa Samsat telah berhasil dalam mengumpulkan penerimaan pajak dengan efisien dan efektif, yang pada gilirannya membantu meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Kesimpulan

Presentase Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan PAD
Provinsi Jawa Barat Di Kantor Bersama Samsat Kawaluyaan Tahun 2023

Asli Daerah (PAD) Jawa Barat rata – rata mencapai 61,81%, yang menurut Indikator Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2022 masuk dalam kriteria sangat baik karena melebihi 50%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Samsat Kawaluyaan telah berhasil menjalankan program pemutihan dengan sangat baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.

Meningkatkan usaha-usaha yaitu, a) Penyebaran informasi tentang program pemutihan PKB melalui media media sosial, dan langsung kepada wajib pajak melalui SMS atau WA. b) Penyuluhan dan edukasi secara aktif kepada masyarakat (Sekolah, kantor, dan acara komunitas) c) Pelayanan di Samsat dan proses pembayaran. d) Kerja sama dengan pemerintah daerah dan Lembaga lainnya e) Memperkuat kegiatan pengawasan dan penegakan hukum untuk wajib pajak, dan f) Evaluasi secara berkala dan menerima masukan dari masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

DAFTAR PUSTAKA

BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT.(2022).Pemerintah Provinsi Jawa Barat Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat. https://jabar.bpk.go.id/files/2022/09/Caber-Agustus-2022_revksb.pdf
Indonesia, B. P. S. (2024). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 14 Mar. 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg=/perkembangan->

[jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html](#)

Juliani, N. T. (2022). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Duri)* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bengkalis).

Kompas.com 16/07/2023 "Jumlah Sepeda Motor di Indonesia Tembus 130 Juta Unit", Klik untuk baca: <https://otomotif.kompas.com/read/2023/07/16/152100215/jumlah-sepeda-motor-di-indonesia-tembus-130-juta-unit>.

Korlantas Polri. (2022). *Dashborad ERI*. [Polri.go.id](http://polri.go.id). Diakses tanggal 26 Mar. 2024, dari <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolda.php>.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (11th ed.)*. Andi Publisher.

Nurhalimah dan Muthmainnah. (2023). *Efektivitas Program Pemutihan PKB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Kawaluyaan*. *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 4(5) 2023 : 6580-6587.

Rumaizha, R., & Pertiwi, G. B. (2024). *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021*. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 10(1), 125-133.

Sektetariat, Website JDIH BPK RI. *Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Sektetariat, Website JDIH BPK RI. *Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas*

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sekretariat, Website JDIH BPK RI. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.

Siahaan, Marihot P, (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ED-I-PT. Jaya Grafindo

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Widajantie, Tituk Diah, & Saiful Anwar. (2020). "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)." Behavioral Accounting Journal 3.2: 129-143.

Copyright holder:

Yati Nurhajati, Rizky Nurmulyani (2025)

First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under:

